



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SITI SYAMSIYAH**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **107140**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

1.375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m²/160 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m²/130 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m²/180 m² di KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 966 m²/500 m² di PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 1.224 m² di BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 3.029 m² di KAUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 7.350 m² di BENGKULU SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
8. Tanah Seluas 102 m² di SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

201.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYLA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000



3. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000
4. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.586.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.586.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **16 April 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.